

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang sangat strategis serta berperan dalam proses pertumbuhan wilayah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak antara 70°32'19" sampai 7°48'33" Lintang Selatan (LS) dan antara 110°26'14" sampai 110°47'51" Bujur Timur (BT), dengan batas-batas daerah sebagai berikut:

3. Sebelah Utara = Kabupaten Boyolali
4. Sebelah Timur = Kabupaten Sukoharjo
5. Sebelah Selatan = Kabupaten Gunungkidul (DIY)
6. Sebelah Barat = Kabupaten Sleman (DIY)

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Klaten



Sumber: pn-klaten.go.id

Dengan luas wilayah sebesar 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah yang luasnya 3.254.412 ha. Dimana luas wilayah tersebut sudah mencakup dari seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang di dalamnya terdapat beberapa

Desa, Kelurahan, Dukuh, beserta Luas Wilayah per kecamatan di Kabupaten Klaten yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
**Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, beserta Luas Wilayah per-
Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014**

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (km ²)
Prambanan	16	-	183	24,43
Gantiwarno	16	-	149	25,64
Wedi	19	-	178	24,38
Bayat	18	-	228	39,43
Cawas	20	-	238	34,47
Trucuk	18	-	171	33,81
Kalikotes	7	-	99	12,98
Kabonarum	7	-	65	9,67
Jogonalan	18	-	202	26,70
Manisrenggo	16	-	252	26,96
Karangnongko	14	-	35	26,74
Ngawen	13	-	124	16,97
Ceper	18	-	42	24,45
Pedan	14	-	151	19,17
Karangdowo	19	-	161	29,23
Juwiring	19	-	208	29,79
Wonosari	18	-	149	31,14
Delanggu	16	-	37	18,78
Polanharjo	18	-	44	23,84
Karanganom	19	-	48	24,06
Tulung	18	-	185	32,00
Jatinom	17	1	207	35,53
Kemalang	13	-	214	51,66
Klaten Selatan	11	1	112	14,43
Klaten Tengah	3	6	97	8,92
Klaten Utara	6	2	124	10,38
Jumlah (Tahun 2014)	391	10	3.703	655,56

Sumber : Klaten dalam Angka 2014 (RP12JM Kabupaten Klaten 2015)

Pada tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa berdasarkan pada dokumen RP12JM Kabupaten Klaten Tahun 2015, Wilayah Kabupaten Klaten pada tahun 2014 terdapat 26 kecamatan yang didalamnya secara keseluruhan terdapat 391 desa, 10 kelurahan, dan 3.703 dukuh. Dari seluruh wilayah administrasi tersebut luas wilayah di Kabupaten Klaten yakni 655,56 km². Kecamatan Cawas merupakan kecamatan di Kabupaten Klaten yang memiliki jumlah desa terbanyak, akan tetapi Kecamatan yang terluas di Kabupaten Klaten yakni Kecamatan Kemalang. Sedangkan Kantor pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten atau biasa dikenal dengan Kantor Bupati Kabupaten Klaten berada di wilayah Kecamatan Klaten Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Klaten terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, diantaranya sebagai berikut:

1. Wilayah lereng Gunung Merapi yakni wilayah Kabupaten Klaten bagian utara, terdiri dari Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom, dan Tulung;
2. Wilayah datar, yakni wilayah Kabupaten Klaten bagian tengah, terdiri dari Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo;
3. Wilayah berbukit (gunung kapur), yakni wilayah Kabupaten Klaten bagian selatan, yang hanya merupakan wilayah sebagian dari Kecamatan Bayat, Cawas, dan Gantiwarno.

6.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten pada Dokumen LKPJ Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten pada tahun 2020 sebanyak 1.327.577 jiwa, yang terdiri dari 660.456 jiwa penduduk laki-laki dan 667.121 jiwa

penduduk perempuan. Jumlah penduduk dari tahun 2020 per-Kecamatan di Kabupaten Klaten dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten per-Kecamatan

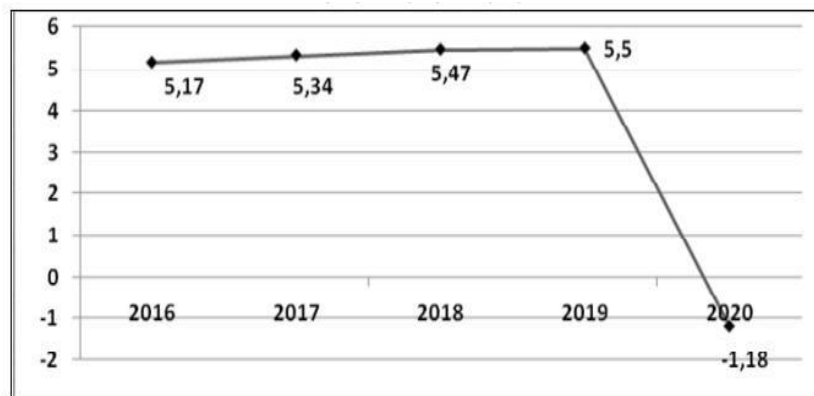
No.	Kecamatan	Tahun 2020	
		Laki-laki	Perempuam
1.	Prambanan	26.181	26.776
2.	Gantiwarno	20.605	20.838
3.	Wedi	27.139	27.533
4.	Bayat	33.002	32.769
5.	Cawas	30.052	30.652
6.	Trucuk	41.337	40.889
7.	Kebonarum	10.375	10.765
8.	Jogonalan	30.933	30.994
9.	Manisrenggo	21.908	22.428
10.	Karangnongko	19.011	19.356
11.	Ceper	34.078	34.110
12.	Pedan	24.450	24.550
13.	Karangdowo	22.575	22.982
14.	Juwiring	30.588	30.737
15.	Wonosari	32.047	32.308
16.	Delanggu	21.638	21.867
17.	Polanharjo	21.300	21.879
18.	Karanganom	23.525	23.881
19.	Tulung	27.808	27.997
20.	Jatinom	31.105	31.078
21.	Kemalang	20.128	20.215
22.	Ngawen	23.678	23.626
23.	Kalikotes	19.087	19.130
24.	Klaten Utara	24.366	24.890
25.	Klaten Tengah	21.008	21.857
26.	Klaten Selatan	22.532	23.014
JUMLAH		660.456	667.121

Sumber Data: Disdukcapil Kabupaten Klaten Tahun 2020 (LKPJ Bupati Kabupaten Klaten 2020)

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten jumlah penduduk tahun 2020 lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 yakni Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk sejumlah 82.226 jiwa.

6.1.3 Keadaan Perekonomian

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Klaten
Tahun 2015-2019



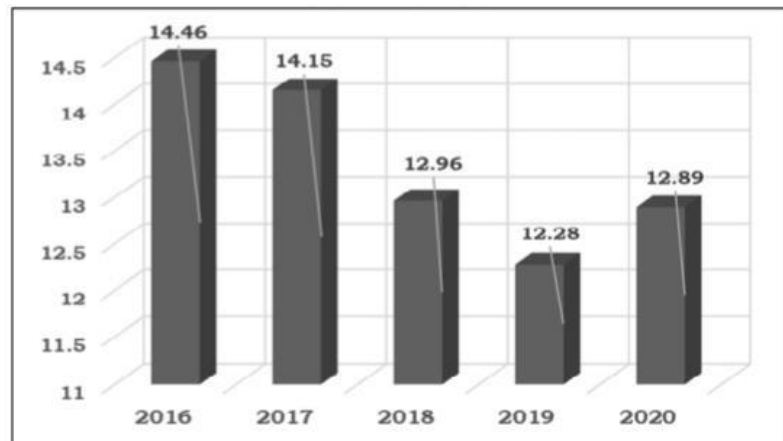
Sumber Data : BPS Kabupaten Klaten (LKPJ Bupati 2020)

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2016 meningkat 5,17%, Tahun 2017 meningkat 5,34%, Tahun 2018 meningkat 5,47%, dan Tahun 2019 meningkat 5,5%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam yakni kontraksi sebesar -1,18%.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Klaten pada Dokumen LKPJ Bupati Kabupaten Klaten tahun 2020, Presentase kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten pada tahun 2016-2019 relatif mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 dampak

dari wabah Covid-19, yakni mengalami kenaikan sebesar 0,61%, seperti pada gambar grafik berikut:

Gambar 3
Grafik Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2020 (LKPJ Bupati 2020)

Presentase penduduk miskin Kabupaten Klaten dari tahun 2020 mengalami peningkatan, yakni dari tahun 2019 sebesar 12,28% meningkat menjadi 12,89% pada tahun 2020, yang diakibatkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19.

6.1.4 Keadaan Sosial

Kondisi sosial Kabupaten Klaten tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya, yang secara umum kondisi sosial tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut disusun untuk mengukur kualitas pembangunan SDM di Kabupaten Klaten. Kondisi IPM di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 75,29 dan pada tahun 2020 sebesar 75,56. Kemajuan tersebut ditandai dengan meningkatnya peluang hidup bayi yang baru lahir, peluang bersekolah, serta meningkatnya pengeluaran per kapita masyarakat. Secara lebih rinci, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten pada tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten
Tahun 2018-2019

UHH		HLS		RLS		Pengeluaran		IPM		Peningkatan
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019-2020
76,68	76,78	13,24	13,25	8,31	8,58	12.074	11.921	75,29	75,56	0,27
Ket : UHH : Umur Harapan Hidup saat lahir HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata-rata Lama Sekolah										

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (LKPJ Bupati, 2029)

Beberapa komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, sedangkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan di tahun 2020.

6.2 Gambaran Umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten

Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, yang terdiri atas Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Gambar 4
Lambang Pemerintah Kabupaten Klaten



Sumber: klatenkab.go.id

Berikut merupakan penjelasan mengenai arti dari lambang pemerintah Kabupaten Klaten:

1. Mahkota Kerajaan

Artinya: Melambangkan kebesaran/keagungan cita-cita.

2. Orang-orang yang bersemedi dengan rambut terurai, kaki berbentuk pita bertuliskan “KLATEN”

Artinya: Orang dengan tekad yang teguh dan suci menuju cita-cita Kabupaten Klaten.

3. Perisai warna kuning emas dengan bingkai segi lima warna putih

Artinya: Menggambarkan perlindungan rakyat menuju jaman keemasan “toto titi tentrem kerto raharjo” dengan prinsip kebajikan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

4. Padi dan Kapas

Artinya: Mencerminkan sandang dan pangan dari hasil pertanian dan perkebunan padi warna kuning emas dengan jumlah 28 kapas warna putih jumlah 10.

5. Tulisan menyerupai huruf jawa

Artinya: “Tumengo Toto Anggotro Raharjo”, yakni 0591 (1950) hari jadi pemerintah Kabupaten Klaten (di tanah jawa) 28-10-1950.

6. Gunungan warna biru muda

Artinya: Gunungan= pembukaan, Warna Biru Muda= warna cerah, tenang, dan tenterak, yaitu tanda pembukaan berdirinya Kabupaten Klaten dan membuka keadaan baru yang tenang dan tentram.

7. Rantai warna kuning melingkar di batang padi dan kapas

Artiya: Menggambarkan persatuan dan kegotong royongan rakyat.

8. Bambu runcing dan api

Artinya: Merupakan simbol perjuangan yang e=berkobar dan menyala menuju cita-cita yang suci dan mulia.

9. Tugu warna putih

Artinya: sebagai peringatan dari perjuangan yang suci.

10. Pohon beringin beserta akarnya berwarna hijau

Artinya: Simbol pengayoman dan perlindungan rakyat menuju keadilan sosial ekonomi yang merata, adil, dan makmur.

11. Warna hitam pada dasar lambang

Artinya: Kuat, tegas, kekal. Maksudnya lambang ini bersifat kuat, tegas dan kekal, baik isi maupun tujuannya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengacu pada Visi **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”**, dan Visi tersebut dicapai melalui beberapa Misi sebagai berikut ini:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif. Kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; serta
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.2.1 Profil Kepemimpinan Bupati Klaten Periode 2017-2021

Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten pada periode 2017-2021 dipimpin oleh seorang Bupati, yakni Hj. Sri Mulyani, yang dimana Beliau sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati pasangan dari Bupati Hj. Sri Hartini, SE yang terpilih pada saat Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015. Dimana pada saat Pilkada Serentak tahun 2015 saat itu, Hj. Sri Hartini, SE dan Hj. Sri Mulyani sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai pasangan nomor urut tiga yang diusung oleh dua partai koalisi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang berhasil memenangkan Pilkada Klaten tahun 2015 dengan perolehan suara sejumlah 321.593 suara dengan presentase 48,90% sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Pasangan Hj. Sri Hartini, SE sebagai Bupati dan Hj. Sri Mulyani sebagai Wakil Bupati, keduanya merupakan figure yang lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan kandidat pasangan bupati dan wakil bupati yang lain. Dimana Hj. Sri Hartini, SE sebelumnya merupakan mantan wakil bupati dari pasangan mantan bupati H. Sunarna, S.E.,M.Hum yang merupakan suami dari Hj. Sri Mulyani. Selain itu Hj. Sri Hartini, SE juga merupakan istri dari mantan bupati Kabupaten Klaten periode 2000-2005, yakni H. Haryanto Wibowo.

Pada masa kepemimpinannya pada tahun 2017, Bupati Hj. Sri Hartini, SE telah melakukan kesalahan dan diberhentikan dari jabatannya karena terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa kasus suap jual beli jabatan. Sejak saat itu, Kementerian Dalam Negeri mengirimkan surat penugasan kepada Wakil Bupati Hj. Sri Mulyani untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Bupati Klaten menggantikan Hj. Sri Hartini, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Klaten.

Setelah menjalankan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Klaten, pada akhirnya pada tanggal 27 November 2017 melalui Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri Nomor 131.33-8601 Tahun 2017, Hj. Sri Mulyani resmi diangkat dan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Klaten untuk periode 2017-2021 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Kusnaedi, 2017). Sejak saat itu, Hj. Sri Mulyani menjalankan kepemimpinannya sebagai Bupati Kabupaten Klaten untuk periode 2017-2021 dengan posisi kekosongan jabatan wakil bupati.

Hj. Sri Mulyani mampu menyelesaikan tanggungjawabnya menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Klaten sebagai Bupati hingga berakhirnya masa kepemimpinannya. Dimana berdasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2019, prioritas daerah yang menjadi fokus dalam

penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klaten oleh Bupati Hj. Sri Mulyani adalah sebagai berikut:

(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:

- a. Pemenuhan layanan dibidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan melalui pemberian beasiswa miskin, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan dan peningkatan akses jamban keluarga yang layak, serta penyediaan listrik bagi keluarga miskin;
- b. Jaminan perlindungan sosial bagi keluarga miskin;
- c. Pemberdayaan ekonomi produktif melalui UMKM;
- d. Penumbuhkembangan wirausaha berbasis UKM;
- e. Penyelenggaraan kursus dan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat usia angkatan kerja yang belum bekerja.

(2) Penguatan potensi ekonomi lokal melalui sektor pertanian/perkebunan, perdagangan, pariwisata, industri, dan UKM serta koperasi, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktifitas dibidang pertanian/perkebunan, peternakan, dan perdagangan;
- b. Peningkatan daya tarik dan daya saing pariwisata;
- c. Peningkatan dan pengembangan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing Industri Kecil Menengah, Koperasi, dan UKM;
- d. Peningkatan dan pengembangan investasi daerah.

(3) Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (jalan, jembatan, drainase, dan irigasi);

- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan, pemukiman, dan utilitas yang berbasis masyarakat serta penyediaan layanan akses listrik;
 - c. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan.
- (4) Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan;
 - b. Penguatan sekolah-sekolah perbatasan;
 - c. Pemenuhan, peningkatan kualifikasi, serta pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat;
 - e. Peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidikan dan kesehatan;
 - f. Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas pembantu, revitalisasi poliklinik desa, dan pengadaan alat kesehatan;
 - g. Pemerataan kualifikasi tenaga kesehatan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas dan rumah sakit, sertifikasi tenaga kerja, dan optimalisasi tenaga kesehatan di tingkat desa.
- (5) Peningkatan pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi, dengan fokus pada:
- a. Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kecepatan, kemudahan, kepastian, dan transparansi pelayanan;
 - b. Peningkatan koordinasi dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah melalui optimalisasi forum

komunikasi pimpinan daerah serta forum komunikasi lintas instansi vertikal;

- c. Peningkatan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah;
- d. Penguatan pengawasan untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- e. Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat;
- f. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintahan serta pengembangan kapasitas dan kualitas pegawai ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten;
- g. Penguatan dan penataan organisasi perangkat daerah;
- h. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
- i. Penataan peraturan dan produk hukum daerah melalui JDIH serta sosialisasi produk hukum daerah, pengawasan dan penanganan peraturan daerah, serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
- j. Percepatan pelaksanaan Tindaklanjut atas hasil pemeriksaan.

(6) Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dengan fokus pada:

- a. Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- b. Peningkatan kinerja dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pengendalian kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan;
- e. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan;

- f. Pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat akan resiko bencana dan penyediaan logistik kebutuhan penanggulangan bencana.

(7) Penguatan ketahanan pangan guna mendukung kedaulatan pangan nasional melalui pengembangan sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan energi yang berkelanjutan, dengan fokus pada:

- a. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (sawah lestari);
- b. Pengembangan sistem pertanian terpadu berbasis teknologi;
- c. Pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Pemenuhan sarana prasarana produksi pertanian;
- e. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan;
- f. Pembangunan dan pengisian lumbung pangan masyarakat;
- g. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi ternak dan perikanan;
- h. Efisiensi pemanfaatan energi, peningkatan pemanfaatan energi alternatif, dan optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan.

Selain itu, selama kepemimpinannya menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Klaten sebagai Bupati, Hj. Sri Mulyani mampu memperoleh beberapa penghargaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Prestasi/Penghargaan Bupati Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2019

NO.	NAMA PRESTASI/PENGHARGAAN
1.	Penghargaan kepada Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Kabupaten Klaten dalam Anugrah Pers Jawa Tengah tahun 2019 kategori Tokoh Bidang Pemerintahan
2.	Penghargaan kepada Bupati Kabupaten Klaten Hj. Sri Mulyani sebagai Top Pembina BUMD 2019 dari majalah <i>Top Business</i>
3.	Piala penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Hj. Sri Mulyani sebagai Bupati Pelopor Inovasi Daerah tahun 2017
4.	Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017, 2018, dan 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
5.	Penghargaan dari BNPB kepada Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani atas keberhasilan yang luar biasa dalam mengurangi resiko bencana banjir pada tahun 2018
6.	Penghargaan dari Kementerian PAN RB kepada Pemkab Klaten atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 dengan predikat nilai “B”
7.	Prestasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan tahun 2018 dari BPK RI perwakilan Jawa Tengah
8.	Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai kabupaten peduli HAM tahun 2017
9.	Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten sebagai anggota integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
10.	Prestasi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015 kepada Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dari PT. Global Inspeksi Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Manajemen LSSM-058-IDN dalam ruang lingkup Sertifikasi : Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK/I), Pendataan Lowongan Kerja di Pemberi Kerja (AK/III), Pemanggilan Pencari Kerja (AK/IV), dan Pengantar Pemberi Kerja (AK/V)
11.	Penghargaan untuk Kategori Percepatan Cakupan Akta Kelahiran Anak pada tahun 2017 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
12.	Sertifikat Penghargaan sebagai Kabupaten Pelaksana Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) Berprestasi dari Kementerian Pertanian
13.	Prestasi Juara Harapan I dalam Lomba Cipta Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2018 Tingkat Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA PRESTASI/PENGHARGAAN
14.	Penghargaan atas tercapainya Luas Tambah Tanam Padi periode Oktober 2016 s/d September 2017 oleh Kementerian Pertanian
15.	Prestasi Juara III Lomba Kreasi Olahan Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) Berbasis Bahan Lokal tahun 2018
16.	Prestasi Juara III dalam Lomba Makanan Khas Jawa Tengah tahun 2018 Kategori Makanan Utama
17.	Prestasi sebagai Pelaksana Terbaik III dalam evaluasi 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
18.	Pemenang III Kategori Kabupaten dalam Pelaksana Terbaik Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018
19.	Juara Harapan II Lomba Pameran Produk Unggulan dan Potensi Jawa Tengah Kategori CRAFT tahun 2018
20.	Juara I Lomba Pameran Produk Unggulan dan Potensi Jawa Tengah Kategori Penataan Stand tahun 2018
21.	Juara III Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Lomba Hemat Energi Kategori Instansi Pemerintah tahun 2018
22.	Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Lomba Dekranasda Carnival tahun 2018
23.	Juara Harapan III Tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam Lomba Stand Terbaik Pesona Kriya Dekranasda tahun 2018
24.	Penghargaan Juara Harapan II Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017
25.	Juara III Stand Terbaik pada acara Jateng Fair 2017 oleh Disperindag Provinsi Jawa Tengah
26.	Rastra (Beras Sejahtera) sebagai Award Terbaik Ke-3 tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017
27.	Juara Terbaik Harapan Ke-3 dalam Dekranasda Carnival Provinsi Jawa Tengah oleh Dekranasda Provinsi Jawa Tengah tahun 2017
28.	Prestasi Juara II Pemenang Pameran Produk Unggulan dan Potensi Daerah Jawa Tengah tahun 2017 Kategori Tenun oleh Gubernur Jawa Tengah

Sumber: klatenkab.go.id

Berdasarkan pada tabel 4 diatas, selama kepemimpinannya pada tahun 2017-2019, Hj. Sri Mulyani sebagai Kepala Daerah Kabupaten Klaten berhasil meraih 28 penghargaan sebagai hasil dari upayanya

dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Klaten, dimana penghargaan yang diperoleh tersebut merupakan penghargaan yang diberikan di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional.

2.2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

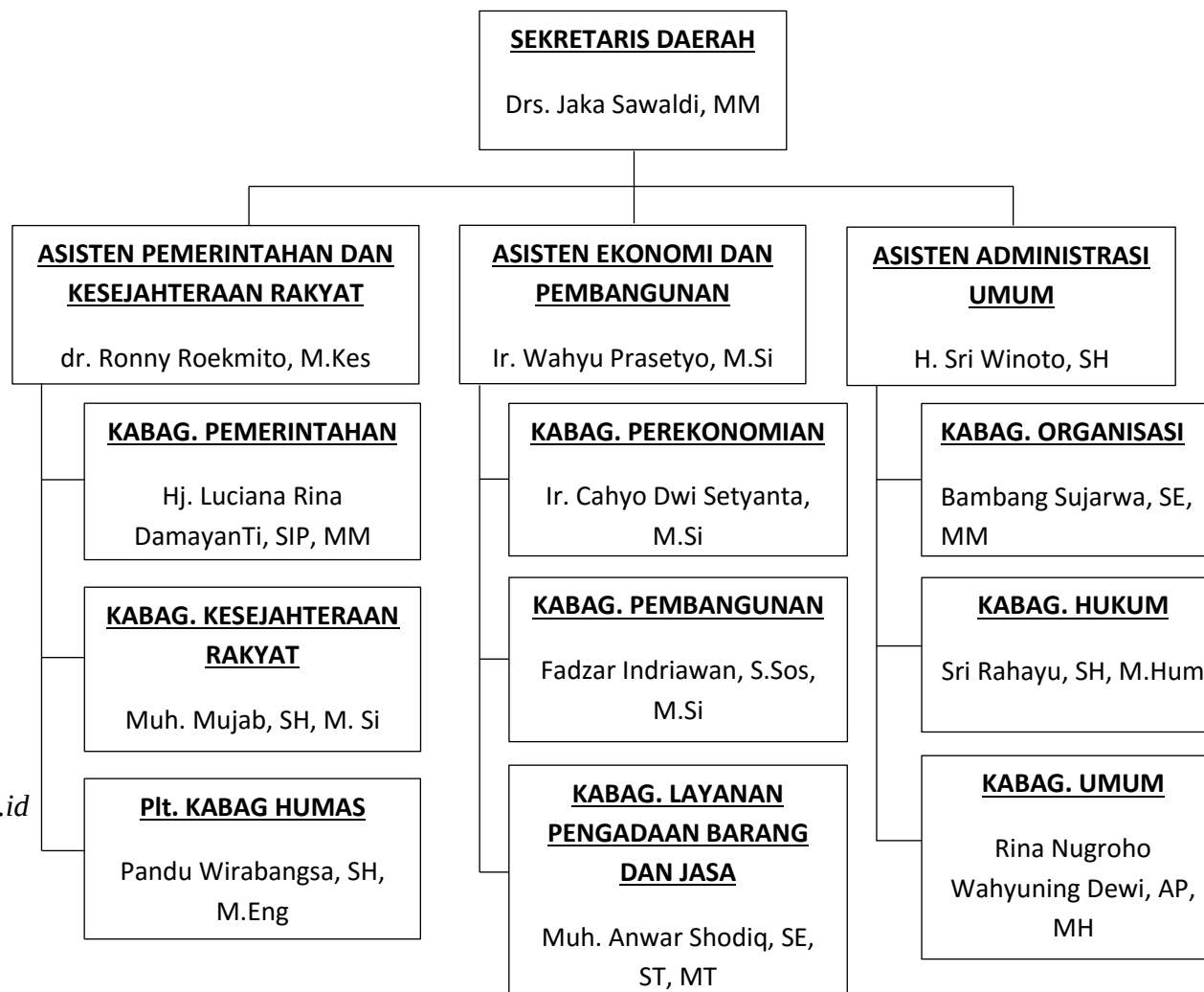
Berdasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris Daerah, memiliki 3 Asisten:
 - (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Bagian Pemerintahan
 - i) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum
 - ii) Sub Bagian Administrasi dan Otonomi Daerah
 - iii) Sub Bagian Kerjasama dan Batas Daerah
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - i) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
 - ii) Sub Bagian Pendidikan dan Agama
 - iii) Sub Bagian Budparpora P3AKB
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat
 - i) Sub Bagian Analisis dan Kemitraan Media
 - ii) Sub Bagian Pembinaan Informasi dan Publikasi
 - (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Bagian Perekonomian
 - i) Sub Bagian Pembinaan dan Pemanfaatan SDA
 - ii) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

- iii) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Usaha
 - b. Bagian Pembangunan
 - i) Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
 - ii) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - i) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan
 - ii) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - iii) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Bagian Organisasi
 - i) Sub Bagian Kelembagaan
 - ii) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - iii) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - b. Bagian Hukum
 - i) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
 - ii) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - iii) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 - c. Bagian Umum
 - i) Sub Bagian Perencanaan Tata Usaha dan Keuangan
 - ii) Sub Bagian Rumah Tangga
 - iii) Sub Bagian Perlengkapan

Lebih jelasnya struktur organisasi sekretariat daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada bagan berikut:

Tabel 2.5
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten



Sumber: klatenkab.go.id

Berdasarkan pada bagan tabel diatas, dapat diketahui bahwa organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten sebagai unsur perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terdapat Sekretaris Daerah yaitu Drs. Jaka Sawaldi, MM, yang dibawahnya terdapat 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum. Ketiga Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten tersebut masing-masing terdiri dari bagian-bagian yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Pada setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Klaten tersebut terdapat sejumlah pegawai/staf yang berkedudukan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepada Bupati baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah pegawai/staf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah PNS/CPNS di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Klaten

No.	Subyek Populasi	Jumlah	Golongan				Jabatan		
			Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Str	Fung	Fum
1	Sekretariat Daerah	7	0	0	0	7	7	0	0
2	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	0	1	5	3	4	0	5
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	14	0	4	9	1	3	0	11
4	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	19	0	3	15	1	3	4	11
5	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	8	0	1	6	1	4	0	4
6	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	8	0	0	6	2	4	0	4

No.	Subyek Populasi	Jumlah	Golongan				Jabatan		
			Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Str	Fung	Fum
7	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	13	0	2	9	2	4	1	8
8	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	0	1	11	1	4	0	9
9	Bagian Umum Sekretariat Daerah	53	0	28	24	1	4	0	49
10	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	13	0	0	12	1	4	2	7
Jumlah		157	0	40	97	20	41	7	108

Sumber: bkppd.klatenkab.go.id, Data Tahun 2020 Bulan 4

Berdasarkan pada tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 150 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai staf/bawahan dalam membantu Bupati Hj. Sri Mulyani menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Klaten baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat sejumlah 5 pegawai yang menduduki di Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, dan sisanya bekerja di bagian-bagian yang terdapat didalamnya.

2.2.3 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Klaten Periode 2019-2024

Dewan Perwakilan Rakyat (DRPD) atau merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah juga merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini sebagai lembaga yang mengontrol berjalannya penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati.

Berdasarkan pada keputusan KPU Kabupaten Klaten, pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tahun 2019, disesuaikan dengan jumlah penduduk maka alokasi kursi DPRD Kabupaten Klaten adalah sebanyak 50 kursi yang terbagi ke dalam 5 (lima) dapil. Dimana sesuai dengan Keputusan KPU

Kabupaten Klaten Nomor: 549/PL.01.9-Kpt/3310/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum tahun 2019, daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Klaten
pada Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Partai Politik	No Urut Calon	Nama Calon Terpilih
DAERAH PILIHAN KLATEN 1			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Muh. Anwar
2	Partai Gerindra	1	H. Dwi Atmaja, SE
3	PDI Perjuangan	1	Agus Riyanto
4	PDI Perjuangan	5	Widada Gendut, S.H
5	PDI Perjuangan	6	Diah Eva Subadra, S.H
6	PDI Perjuangan	3	Arry Shinta Wati
7	Partai GOLKAR	2	H. Heri Wibawa, S.H, M.M.
8	Partai Nasdem	8	Willy Paul Rindorindo
9	Partai Keadilan Sejahtera	1	Sudibyo, S.E, M.M.
10	Partai Amanat Nasional	1	H. Muh. Nurcholis Madjid, S.E, M.M.
11	Partai Demokrat	10	Siwi Kusumastuti
DAERAH PILIHAN KLATEN 2			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Jumarno,S.Sos
2	Partai Gerindra	1	Suyatmi
3	PDI Perjuangan	1	Aris Widiharto, S.E
4	PDI Perjuangan	2	Eko Prasetyo, S.E,M.Si
5	PDI Perjuangan	5	Gigit Sugito, S.Sos
6	Partai GOLKAR	1	H. Triyono,S.Pd,M.M.
7	Partai GOLKAR	4	Dalono
8	Partai Keadilan Sejahtera	10	Widodo,S.H.,M.H.
9	Partai Amanat Nasional	1	H. Darmadi,S.Pd.,S.H.,M.H
10	Partai Demokrat	10	Ir. H. Heru Siswandono

DAERAH PILIHAN KLATEN 3			
1	PDI Perjuangan	5	Joko Siswanto
2	PDI Perjuangan	3	Drs. H. Sriyanto
3	PDI Perjuangan	2	Much. Hasyim
4	Partai GOLKAR	8	Bahtiar Joko Widodo, S.P
5	Partai GOLKAR	6	Harsoro,S.H.
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	dr. Yudi B. Prabawa
7	Partai Persatuan Pembangunan	1	Legiman
8	Partai Amanat Nasional	3	Hj. Sri Astuti
DAERAH PILIHAN KLATEN 4			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2	Ir. Ruslan Rosidi
2	Partai Gerindra	1	H. Hariyanto,S.Pd
3	Partai Gerindra	2	Yusuf Efendi, A. Md
4	PDI Perjuangan	8	H. Sutarna, S.H.
5	PDI Perjuangan	5	Didit Raditya Ganis Ariwardono,S.P.
6	PDI Perjuangan	4	Andy purnomo,S.H.
7	Partai GOLKAR	2	Dinda Permatasari
8	Partai Keadilan Sejahtera	7	Agus Tri Wibowo
9	Partai Persatuan Pembangunan	3	Wakhid Nurdianta
DAERAH PILIHAN KLATEN 5			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Ahmad Mutohar,S.Ag.
2	Partai Gerindra	1	Marthenny
3	PDI Perjuangan	4	Hj. Hartanti,S.H.,M.Si.
4	PDI Perjuangan	7	H. Edy Sasongko
5	PDI Perjuangan	1	Mulyatminah,S.AP.
6	PDI Perjuangan	3	Hamenang Wajar Ismoyo,S.I.Kom
7	PDI Perjuangan	12	Sri Murni
8	PDI Perjuangan	11	Fakhrudin Ali Ahmad
9	Partai GOLKAR	4	Basuki Effendi
10	Partai Keadilan Sejahtera	1	Marjuki,S.IP
11	Partai Amanat Nasional	1	H. Wiyanto
12	Partai Demokrat	11	Handung Dwipayana

Sumber: kpu-klatenkab.go.id

Berdasarkan pada tabel 7 diatas, dapat dilihat bawa pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Klaten tahun 2019, terdapat 5 dapil, dengan alokasi jumlah kursi yang berbeda, yakni pada Dapil Klaten 1 terdapat 11 kursi, Dapil Klaten 2 terdapat 10 kursi, Dapil Klaten 3 terdapat 8 kursi, Dapil Klaten 4 terdapat 9 kursi, dan Dapil Klaten 5 terdapat 12 kursi. Dimana secara keseluruhan jumlah kursi DPRD Kaupaten Klaten pada Pemilu DPRD Tahun 2019 terdapat 50 kursi. Dimana secara keseluruhan perolehan kursi Partai Politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Klaten pada Tahun 2019 tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Perolehan Kursi Partai Politik Pemilu DPRD
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi dalam Periode 2019-2024
1.	PDIP	19 Kursi
2.	Golkar	7 Kursi
3.	Gerindra	5 Kursi
4.	PKB	4 Kursi
5.	Nasdem	1 Kursi
6.	PKS	5 Kursi
7.	PAN	4 Kursi
8.	PPP	2 Kursi
9.	Demokrat	3 Kursi
10.	Garuda	0 Kursi
11.	PSI	0 Kursi
12.	Berkarya	0 Kursi
13.	HANURA	0 Kursi
14.	Perindo	0 Kursi
15.	PBB	0 Kursi
16.	PKPI	0 Kursi

Sumber: *kpu-klatenkab.go.id*

Dari tabel 8. tersebut dapat dilihat bahwa hanya terdapat 9 (sembilan) Partai Politik yang memperoleh kursi untuk periode 2019-2024. Sedangkan pada saat Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2019 tersebut, masing-masing Partai Politik juga memiliki perolehan suara sah yang berbeda, dimana jumlah perolehan suara sah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Perolehan Suara Partai Politik pada Pemilu DPRD
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara pada Pemilu Tahun 2019
1.	PDIP	289.487
2.	Golkar	95.524
3.	Gerindra	56.208
4.	PKB	55.772
5.	Nasdem	26.365
6.	PKS	68.720
7.	PAN	50.368
8.	PPP	35.005
9.	Demokrat	42.465
10.	Garuda	1.515
11.	PSI	6.507
12.	Berkarya	6.133
13.	HANURA	15.262
14.	Perindo	10.338
15.	PBB	2.258
16.	PKPI	392

Sumber: kpu-klatenkab.go.id

Berdasarkan pada tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa pada Pemilu DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019, perolehan suara sah

terpilih dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakni sejumlah 289.487 suara. Sedangkan perolehan suara sah terpilih yang paling sedikit dimiliki oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yakni sejumlah 26.365. Sedangkan sisanya terdapat 7 Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Klaten karena jumlah suara yang diperoleh tidak memenuhi.

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2017 (Pasal 20) tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten memiliki hubungan kerja dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang didasarkan atas kemitraan yang sejajar terutama dalam pembentukan Peraturan Daerah, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Rapat Konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan dalam hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten terdapat Sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selain itu DPRD Kabupaten Klaten juga memiliki Alat Kelengkapan yang bertugas dalam membantu kelembagaan DPRD dalam rangka pembuatan kebijakan. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten terdiri dari:

- 1) Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua DPRD I
 - c. Wakil Ketua DPRD II
 - d. Wakil Ketua DPRD III
- 2) Anggota DPRD

DPRD Kabupaten Klaten secara keseluruhan terdiri dari 50 Anggota yang tersebar ke dalam 9 Partai Politik

- 3) Badan, terdiri dari:
- a. Badan Kehormatan
 - b. Badan Anggaran
 - c. Badan Musyawarah
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
 - e. Komisi, terdiri dari:
 - a) Komisi I
 - b) Komisi II
 - c) Komisi III
 - d) Komisi IV

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten periode 2019-2024 terbagi kedalam 7 (tujuh) Fraksi, yang terdiri dari 6 (enam) fraksi utuh dan 1 (satu) fraksi gabungan dari beberapa partai politik, yakni:

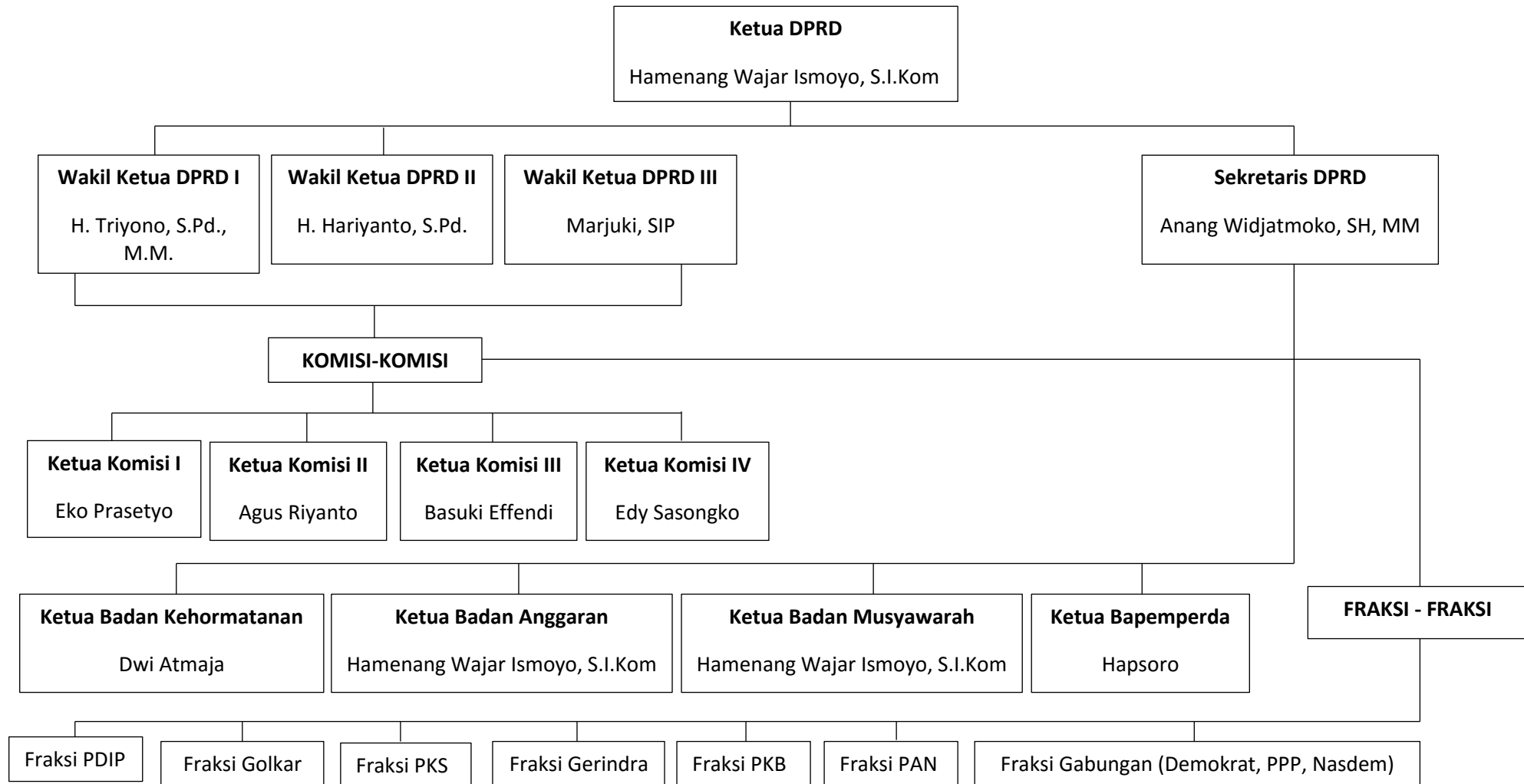
(1) Fraksi Utuh, terdiri dari:

- Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar);
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan
- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

(2) Fraksi Gabungan, merupakan gabungan dari Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel bagan berikut ini:

Tabel 2.10
Struktur Organisasi DPRD Kabupaten Klaten
Periode 2019-2024



Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa lembaga legislatif Kabupaten Klaten dipimpin oleh Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom sebagai Ketua DPRD, dan memiliki 3 (tiga) Wakil DPRD Kabupaten Klaten serta terdiri dari 4 (empat) komisi beserta dengan alat kelengkapan DPRD yang lain. Selain itu juga terbagi kedalam 7 fraksi, yang secara keseluruhan terdapat sejumlah 50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten tersebar ke dalam 9 (Sembilan) Partai Politik dari 16 (Enam Belas) Partai Politik yang memperoleh kursi pada saat Pemilu DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2019.